

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN,  
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nazeliah Komala Sari

NPP. 32.0790

Asdaf Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Program

Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Email:

[32.0790@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0790@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Mohamad Zaki Taufik, AP, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement (Kesenjangan Penelitian):** *The problem identified in this study lies in the persistent presence of street children, homeless individuals, and beggars in Balikpapan City, despite the existence of various government policies and programs such as the Mayor Regulation of Balikpapan Number 6 of 2019 concerning the Integrated Handling System for Social Welfare Problems in Children. This gap indicates a discrepancy between the established policies and their implementation in the field, as the phenomenon continues to exist in the area. Although the Social Service of Balikpapan City has carried out various programs to address these issues, there has been no in-depth study analyzing the extent of the Social Service's role in the development and rehabilitation of street children, homeless individuals, and beggars, including the obstacles faced in its implementation. Therefore, this research is necessary to determine the role of the Social Service in the development of street children, homeless individuals, and beggars in Balikpapan City, East Kalimantan Province.*

**Method:** *This research was conducted using a descriptive qualitative method, based on the theory of Jones (1993) in Mahsun (2008), which examines roles through three indicators.*

**Result:** *Based on the findings, it can be concluded that the development efforts conducted by the Social Service toward street children, homeless individuals, and beggars have been carried out effectively through a series of stages, including street outreach, identification and registration, as well as assessment to examine the issues, potential, family and environmental conditions, and individual needs. Subsequently, social workers provide assistance to foster interaction and communication. Further development continues at the Social Protection House through various services such as rehabilitation, advocacy, assistance and care, which encompass physical, mental, spiritual, and social guidance, health services tailored to the participants' needs, and recreational-educational services offering educational support. The effectiveness of these efforts is reflected in the decreasing number of street children, homeless individuals, and beggars year by year.*

**Conclusion:** *The role of the Social Service of Balikpapan City in the development of street children, homeless individuals, and beggars has been implemented systematically and comprehensively through various stages and services. These include outreach, identification, registration, and assessment to understand individual conditions and needs, followed by assistance from social workers. This development process is reinforced through services at the Social Protection House, which include rehabilitation, advocacy, caregiving, health*

*services, and recreational-educational support. All these efforts have shown positive results, as evidenced by the declining number of street children, homeless individuals, and beggars over the years.*

**Keywords:** *Role; Social Service; Street Children; Homeless; Beggars; Development.*

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian):** Permasalahan (kesenjangan penelitian) yang muncul dari latar belakang tersebut terletak pada masih ditemuinya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan meskipun telah tersedia berbagai kebijakan dan program pemerintah, seperti Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan, di mana fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih terdapat di wilayah Kota Balikpapan. Meskipun Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menjalankan berbagai program untuk mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, belum ada kajian yang secara mendalam mengulas sejauh mana peran Dinas Sosial dalam aspek pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. **Metode :** Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dasar teori Jones (1993) dalam Mahsun (2008), yang mengkaji peran dalam tiga indikator. **Hasil/Temuan :** Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah berjalan dengan baik melalui serangkaian tahapan, mulai dari penjangkauan di jalanan, identifikasi dan registrasi, hingga asesmen untuk menelaah permasalahan, potensi, kondisi keluarga dan lingkungan, serta kebutuhan individu. Selanjutnya, dilakukan pendampingan oleh Pekerja Sosial guna mengembangkan interaksi dan komunikasi. Pembinaan juga dilanjutkan di Rumah Perlindungan Sosial melalui berbagai pelayanan seperti rehabilitasi, advokasi, pendampingan dan pengasuhan yang mencakup bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta pelayanan rekreatif dan edukatif yang menyediakan layanan pendidikan. Efektivitas pembinaan ini terlihat dari berkurangnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari tahun ke tahun. **Kesimpulan:** Peran Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh melalui berbagai tahapan dan layanan. Mulai dari penjangkauan, identifikasi, registrasi, hingga asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan individu, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan oleh Pekerja Sosial. Pembinaan tersebut diperkuat melalui pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial yang mencakup aspek rehabilitasi, advokasi, pengasuhan, kesehatan, hingga rekreatif-edukatif. Seluruh upaya ini menunjukkan hasil yang positif, yang tercermin dari menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari tahun ke tahun.

**Kata Kunci:** Peran; Dinas Sosial; Anak Jalanan; Gelandangan; Pengemis; Pembinaan

# **I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjial-gepeng) merupakan persoalan kompleks yang perlu dipahami secara sosiologis (Purwoko, 2013). Mereka hidup dalam kondisi terdesak akibat kurangnya perhatian keluarga dan lingkungan sekitar yang juga mengalami kesulitan ekonomi (Anggraini, 2022) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab atas fakir miskin dan anak terlantar, namun kenyataannya masih banyak anak yang belum terurus (Almaida et al., 2023). Oleh karena itu, pembinaan terhadap anjal-gepeng sangat diperlukan agar mereka dapat menjadi aset bangsa. Anak-anak ini memiliki potensi yang perlu dihargai dan dikembangkan.

Permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis semakin krusial karena terjadi peningkatan di berbagai daerah (Caesar & LISTANIA, 2021). Gelandangan dan pengemis tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ketidaksetaraan sosial, tetapi juga berkaitan dengan realitas kompleks berbagai permasalahan. Misalnya, permasalahan ekonomi, bahwa gelandangan dan pengemis menghadapi ketidaksetaraan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan akses dalam memperoleh pekerjaan, bahkan karena tidak memiliki kesempatan untuk menggali potensi dan memperoleh pekerjaan yang layak (Idza, 2023). Hal ini menunjukkan masih banyak warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya (Nagaring, 2021). Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945.

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan satu kesatuan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelayanan dasar yang salah satunya mencakup masalah sosial menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota (Sekarini, 2018). Pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan nilai-nilai serta sumber daya lokal merupakan strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung upaya ini dengan memobilisasi potensi ekonomi daerah dan mendorong terciptanya kemandirian masyarakat (Okta et al., 2024).

Di Kota Balikpapan, angka kemiskinan meningkat pada 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 18.530 jiwa (BPS Balikpapan, 2021). Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah PMKS, termasuk anjal-gepeng. Berdasarkan pengamatan (Erida, 2024), anjal-gepeng tersebar di berbagai jalan protokol dan hidup dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian bahkan dikoordinir oleh kelompok tertentu yang bersifat terorganisir dan profesional, dikenal sebagai mafia anak jalanan.

Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak dan Perwali No. 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak. Dalam Perwali tersebut dijelaskan mekanisme penanganan melalui pemetaan, pembinaan, dan pemberdayaan keluarga melalui pelatihan keterampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif. Dinas Sosial Kota Balikpapan memegang peran penting melalui program rehabilitasi sosial untuk menangani anjal-gepeng, sesuai dengan regulasi yang ada. Harapannya, program ini mampu mengurangi jumlah anjal-gepeng secara nyata dan berkelanjutan.

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan, perlu dilakukan kajian terhadap efektivitas peran Dinas Sosial dalam membina anjal gepeng agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berdampak nyata dan berkelanjutan. Maka dari itu, untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan Provinsi

Kalimantan Timur, peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dan pengkajian mengenai bagaimana peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami tingkat urbanisasi tinggi dan dinamika sosial yang kompleks. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, kota ini masih menghadapi permasalahan sosial, salah satunya adalah keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjial-gepeng) yang tersebar di sejumlah titik strategis seperti jalan protokol, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum.

Fenomena ini mencerminkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum terpenuhi hak dasar dan perlindungan sosial secara layak. Pemerintah Kota Balikpapan telah merespons permasalahan ini melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak, yang mengatur penanganan secara menyeluruh mulai dari pemetaan, pengolahan data, pembinaan, hingga pemberdayaan.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keberadaan jaringan eksploitasi anjial-gepeng secara terorganisir menjadi hambatan utama. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan serta penguatan peran Dinas Sosial dan lembaga terkait. Upaya penanganan anjial-gepeng harus diarahkan pada sistem yang tidak hanya responsif, tetapi juga bersifat preventif, rehabilitatif, dan memberdayakan secara berkelanjutan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan peneliti dalam pengkajian penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti juga dapat membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta memastikan tidak ada kesamaan atau plagiarisme. Pertama, terkait pentingnya pendataan, (Syamsurya, 2022) dalam jurnal berjudul Peran Dinas Sosial Kota Samarinda dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Samarinda menjelaskan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial sudah cukup banyak, namun masih belum maksimal karena masih banyak anak jalanan dan pengemis yang belum terjaring.

Selanjutnya, (Wahyudi et al., 2021) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar” menemukan bahwa aspek pembinaan pencegahan dilakukan dengan kegiatan patroli setiap hari secara rutin oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau yang disingkat dengan (TRC), aspek pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengetahui alasan anak turun ke jalanan dengan cara identifikasi atau assesment di RSPA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), dan aspek pembinaan rehabilitasi anak jalanan adalah kerja sama Dinas Sosial Kota makassar dengan Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba atau biasa di singkat dengan (YKP2N).

Selain itu, penelitian (N et al., 2023) yang berjudul Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo mengungkapkan Dinas Sosial PPPA dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo sudah sesuai dengan peraturan Walikota Probolinggo nomor 38 tahun 2019 dengan tersedianya rumah singgah sementara (Shelter) termasuk pengelolanya sebagai tempat pembinaan para Gelandangan Pengemis (GEPENG),

koordinasi bersama Satpol PP. Adapun hambatan dalam menangani masalah GEPENG yaitu terbatasnya rumah singgah sementara (Shelter) bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga daya tampung yang kurang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian (Rachma, 2023) mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya, program Dinas Sosial meliputi penanganan pendidikan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun, kendala utama adalah besarnya rasa malas belajar serta kecenderungan anak yang kembali ke lingkungan jalanan dan aktivitas ekonomi di sana setelah pembinaan.

Penelitian oleh (Abdullah, 2021) dengan judul Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda menemukan bahwa Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya termasuk kerja sama dengan SATPOL-PP dalam razia penertiban anak jalanan untuk kemudian didata dan dibina. Faktor pendukung utama adalah ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan dari SATPOL-PP. Namun, faktor penghambat yang dominan adalah kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat serta kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu.

Sementara itu, (Djaafar et al., 2022) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Pengemis di Kota Gorontalo menyatakan bahwa pembinaan dilakukan melalui bimbingan mental, pemberdayaan dengan pelatihan, dan pembiayaan modal usaha bagi pengemis sebagai upaya meningkatkan kemandirian mereka.

Penelitian oleh (Salsabila et al., 2022) yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak gelandangan dan pengemis, bahkan ada golognan yang bertambah. Sebenarnya perencanaan yang dibuat dari Dinas Sosial sudah baik, dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program. Tetapi pada realisasinya kinerja belum maksimal bahkan belum terealisasi sama sekali. Misalnya sarana dan prasana rehabilitasi di kota Tanjung Pinang masih belum ada.

(Destiani et al., 2023) dalam penelitiannya Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau menyatakan bahwa upaya penanggulangan anak pengemis oleh Dinas Sosial Kota Baubau, seperti pendataan, pembinaan, dan sosialisasi, belum berjalan optimal. Pendataan masih terbatas pada saat patroli, dan banyak anak kembali mengemis meskipun telah dibina. Sosialisasi pun belum disertai sanksi tegas, sehingga belum menimbulkan efek jera.

Penelitian (Puri & Hertati, 2024) yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Surabaya menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial Kota Surabaya mencakup fungsi fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Eksploitasi anak terjadi karena kebiasaan yang terbentuk akibat lemahnya peran khusus dalam penanganan dan rendahnya penegakan hukum. Faktor ekonomi juga mendorong anak untuk mengamen atau mengemis karena dianggap lebih menguntungkan. Dinas Sosial menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya hukum, status domisili yang tidak jelas, keterbatasan sarana prasarana, dan kurangnya tenaga terampil.

(Tambawang et al., 2023) dalam penelitiannya Pembinaan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya menyebutkan bahwa penanganan anak jalanan di Kabupaten Jayawijaya dilakukan melalui tiga pendekatan: *street based* dengan pemantauan dan edukasi langsung di lapangan, *community based* dengan penyadaran peran keluarga melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta bimbingan sosial berupa pelatihan keterampilan dan pembinaan karakter bagi anak-anak agar mandiri dan berperilaku positif di Masyarakat.

(Nasution & Thamrin, 2016) dalam penelitian Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan menemukan bahwa implementasi kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2014 dilakukan sudah cukup baik. Hanya kurangnya fasilitas dan dana untuk menjalankan pembinaan bagi

gelandangan dan pengemis, ini berarti Sistem komputerisasi di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) baik sehingga pekerjaan pegawai menjadi efektif.

Penelitian (Pratama Afjan & Hayat, 2023) tentang Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang) menyatakan bahwa Implementasi Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Malang belum optimal menurut teori Van Meter dan Van Horn. Meskipun didukung oleh ketersediaan sumber daya dan fasilitas Shelter Liponos Camp Assessment, pelaksanaannya masih terkendala oleh mobilitas penyandang masalah sosial dan ketiadaan SOP razia dari Dinas Sosial.(Pratama Afjan & Hayat, 2023).

Penelitian (Sakir et al., 2023) yang berjudul Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan membahas tentang strategi Dinas Sosial Kota Makassar dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengamen, dan pengemis mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2008, dengan fokus pada pendataan dan pemberian arahan. Namun, upaya tersebut masih terkendala oleh belum tersedianya panti rehabilitasi sebagai tempat pembinaan khusus, sehingga menyulitkan pengurangan jumlah anak jalanan secara efektif.

Penelitian Agung Nurrahman yang berjudul Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi membahas tentang Studi ini menyoroti lima unsur utama peran pemerintah dalam teori peran di Indonesia, termasuk kontrak sosial-politik, musyawarah kebijakan publik, hingga implementasi kebijakan. Dalam kasus penanganan isu radikalisme, kebijakan pemerintah dinilai bertentangan dengan konstitusi, janji kampanye, dan visi kementerian terkait. Kebijakan tersebut juga disusun tanpa proses partisipatif yang memadai. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik ke depan perlu melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan ruang virtual, yang hingga kini belum difasilitasi secara optimal oleh pemerintah. (Nurrahman, 2020).

Penelitian Annisa Rahmadanita yang berjudul Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis) didapatkan bahwa pembinaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap gelandangan dan pengemis meliputi penyusunan peraturan penertiban, pendataan yang konkret dan akurat, pembangunan komunitas yang melibatkan masyarakat dalam mendukung penertiban dan pembinaan, serta perancangan program pembinaan dan pendampingan yang bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan juga menjadi hal penting. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, memberikan ruang partisipasi aktif kepada masyarakat, serta secara rutin menyusun dan mengevaluasi program pembinaan yang ada (Rahmadanita, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Hidayah yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menemukan bahwa pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis belum berhasil sepenuhnya karena masih ada tujuan kebijakan yang belum tercapai, keterbatasan dana, dan pelaksanaan yang belum maksimal meski koordinasi antarinstansi cukup baik. Dukungan masyarakat juga masih rendah, dan banyak yang telah dibina kembali turun ke jalanan. Analisis SWOT mengidentifikasi sembilan isu strategis yang perlu ditangani.(Hidayah, 2020)

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam kajian peran institusi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Balikpapan, dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjak-gepeng). Kebaruan penelitian ini terletak pada aspek teoretis peran yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan menurut Jones (1993) pendekatan analitis terhadap tiga fungsi utama dinas sosial, yaitu peran perencana (regulatory role), pelaksana (enabling role), dan pengawas (direct role), yang dipadukan dengan data empirik hasil wawancara langsung dengan pejabat dan pelaksana teknis di

lapangan. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti program secara normatif atau deskriptif, penelitian ini menelaah secara rinci proses penyusunan perencanaan program, pelaksanaan intervensi sosial, serta sistem pengawasan dan evaluasi dampaknya terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan program, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor, efektivitas pendampingan, dan keberlanjutan pengawasan.

Diskusi Temuan Utama Penelitian Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dari berbagai aspek yaitu metode yang digunakan, teori, serta objek penelitian. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya yaitu mengisi kekurangan penelitian dari ketiga aspek di atas. Dalam menjabarkan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana menekankan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sehingga diperoleh makna yang mendalam atas situasi yang terjadi secara alami atau apa adanya. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada pendekatan fisik dan ekonomi, seperti razia, shelter, pelatihan keterampilan, dan pemberian modal. Bentuk pembinaan Dinas Sosial yang dilakukan pada pendekatan psikososial umumnya belum dominan diterapkan. Penekanan masih pada Tindakan preventif dan rehabilitative fisik. Keterlibatan pihak lain pun masih terbatas misalnya Satpol PP, yayasan mitra, atau shelter dan masih bersifat sektoral. Pada pendekatan kolaboratif, belum maksimal atau masih terhambat oleh fasilitas dan koordinasi antarinstansi. Adapun kendala umum pada penelitian lain terdapat pada keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat/orang tua, dan anak kembali ke jalan. Maka dari itu, adapun yang menjadi pembeda pada ini ialah tentang bagaimana pendekatan pembinaan Menggunakan pendekatan holistik dan humanis: tidak hanya fisik dan ekonomi, tapi juga menyentuh psikososial, edukatif, dan spiritual. Pendekatan Psikososial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Balikpapan menggunakan konseling dan terapi sebagai bagian dari proses pembinaan, untuk menyentuh aspek emosional dan psikologis anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. gepeng. Keterlibatan pihak lain pada penelitian ini ditemui bahwa terdapat sinergi multi pihak seperti LSM, tokoh masyarakat, lembaga pelatihan, bahkan unsur keagamaan terlibat secara aktif. Pada pendekatan kolaboratif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Balikpapan yang melakukan kolaborasi lintas sektor berjalan cukup efektif dan strategis sebagai bentuk pendekatan integratif dan adaptif. Temuan penelitian di Dinas Sosial Kota Balikpapan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung menekankan aspek teknis, administratif, atau sektoral, pendekatan di Balikpapan menonjol karena menyeluruh, humanis, dan kolaboratif. Fokusnya bukan hanya pada penertiban atau pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pemulihan mental, spiritual, dan sosial anak jalanan, gepeng, serta pelibatan komunitas sebagai kekuatan sosial.

Kemudian, dengan dasar teori peran milik Jones dalam Mahsun (2008) dapat dipahami bahwa peran dapat dinilai terlaksana melalui keterwujudan tiga aspek, yaitu rencana peran, pelaksana peran, dan pengawas peran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah berjalan dengan baik melalui beberapa tahapan, seperti penjangkauan di jalanan, identifikasi dan registrasi, asesmen mendalam terhadap kondisi sosial, potensi, serta lingkungan keluarga, hingga proses pendampingan oleh pekerja sosial dan pemberian layanan rehabilitasi, advokasi, pengasuhan, kesehatan, serta pendidikan di Rumah Perlindungan Sosial.

Sama halnya dengan temuan penelitian Andi Wahyudi, Jaelan Usman, dan Ansyari Mone (2021) di Kota Makassar, yang juga menunjukkan bahwa proses pembinaan terhadap anak jalanan dilakukan melalui tahapan identifikasi, asesmen, dan rehabilitasi, termasuk kerja sama dengan lembaga eksternal seperti YKP2N. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa di Kota

Balikpapan, pembinaan lebih terintegrasi secara internal dalam lingkup Dinas Sosial, khususnya melalui keberadaan Rumah Perlindungan Sosial yang memiliki pelayanan harian secara menyeluruh. Temuan ini juga memperkuat penelitian Veronica Sri Astuti N, Eko Yudianto Y, dan Feri Apriliansah (2023) yang menyebutkan bahwa ketersediaan rumah singgah menjadi faktor penting dalam proses pembinaan gepeng, seperti yang juga diterapkan di Balikpapan. Namun, berbeda dari Kota Probolinggo yang masih mengalami kendala kapasitas shelter, di Kota Balikpapan pembinaan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan oleh tim petugas sosial yang berdedikasi, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan ketersediaan sarana yang optimal.

Sama halnya dengan temuan Dian Tannia Rachman (2023) di Surabaya, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan pendidikan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Namun, berbeda dengan temuan Dian, penelitian ini menunjukkan bahwa program pendidikan di Rumah Perlindungan Sosial lebih terfokus pada pelayanan rekreatif-edukatif serta dukungan pendampingan spiritual dan sosial secara menyeluruh.

Temuan ini juga selaras dengan penelitian Yanuar Ahmad Abdullah (2021) di Kota Samarinda, yang menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan ditentukan oleh kerja sama antarinstansi seperti Satpol PP, serta peran petugas sosial di lapangan. Namun demikian, temuan ini menunjukkan pendekatan yang lebih mendalam pada aspek pasca-penjangkauan, yakni dalam hal pelayanan rehabilitasi dan advokasi secara sistemik di dalam institusi sosial, tidak hanya pada aspek razia dan penertiban.

Sementara itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Djaafar dkk. (2022) di Kota Gorontalo, yang menekankan pentingnya pembinaan mental dan pemberdayaan ekonomi kepada pengemis. Hal ini juga ditemukan dalam konteks Balikpapan, meskipun pendekatannya lebih luas dan mencakup dimensi fisik, spiritual, sosial, dan edukatif yang diberikan secara simultan di Rumah Perlindungan Sosial.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini memperkuat dan melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya, sekaligus menunjukkan bahwa pola pembinaan di Kota Balikpapan memiliki karakteristik yang cukup komprehensif dan terintegrasi, yang dapat menjadi model rujukan bagi daerah lain dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kebijakan sosial lokal yang lebih holistik dan adaptif dalam menangani permasalahan anjal-gepeng, serta menjadi referensi empiris dalam studi administrasi publik, kesejahteraan sosial, dan kebijakan perlindungan sosial di tingkat daerah.

## **1.5 Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjali gepeng) di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

## **II METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan, baik dari aspek teknis, fasilitatif, maupun edukatif.

Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada pandangan Sugiyono (2019) yang menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai

instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan perilaku, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek penelitian. Dalam konteks ini, metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali data yang tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga mengandung makna dari sudut pandang para pelaku di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga dilandasi oleh paradigma postpositivisme, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat kompleks dan penuh makna. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami dinamika sosial secara kontekstual dan holistik.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Sekretaris Dinas Sosial Kota Balikpapan, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sosial, Masyarakat (dalam hal ini Masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 3 orang), Anak Jalanan (dalam hal ini anak jalanan sebagai objek penelitian sebanyak 2 orang), Gelandangan, dan Pengemis. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada peran dan keterlibatan mereka dalam proses pembinaan serta dampak langsung yang mereka alami atau saksikan. Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dipilih karena mereka memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan. Pekerja Sosial berperan langsung dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Sementara itu, masyarakat dipilih sebagai informan karena mereka menjadi bagian dari lingkungan sosial tempat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis beraktivitas, sehingga dapat memberikan perspektif sosial yang relevan. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dipilih sebagai informan kunci karena mereka adalah subjek langsung dari program pembinaan, sehingga pengalaman dan pandangan mereka sangat penting untuk mengetahui efektivitas program yang telah dijalankan. Untuk memahami peran Dinas Sosial secara konseptual, penelitian ini menggunakan teori peran dari Jones (dalam Mahsun, 2006). Teori ini dipilih karena membagi peran lembaga publik menjadi tiga dimensi utama yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Perencana Peran (Regulatory Role) – menekankan pentingnya regulasi agar pelayanan publik dapat diakses secara adil oleh masyarakat.
2. Pelaksana Peran (Enabling Role) – berfokus pada pelaksanaan kebijakan untuk menjamin tersedianya layanan sosial secara efektif.
3. Pengawas Peran (Direct Role) – menunjukkan peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan layanan agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.

Teori Jones digunakan karena memberikan struktur analitis yang jelas dalam mengkaji fungsi regulatif, pelaksanaan, dan pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Sosial.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara mendalam, untuk mendapatkan informasi langsung dari informan kunci di Dinas Sosial Kota Balikpapan.
2. Observasi, untuk mengamati langsung kegiatan pembinaan di lapangan.
3. Dokumentasi, untuk memperoleh data sekunder dari laporan, arsip, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2022), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengolah dan menyimpulkan data yang kompleks sesuai dengan dinamika di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 25 Januari 2025 di Kantor Dinas Sosial Kota Balikpapan, yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu I, No. 3, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2024/2025.

### III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas serta mendalami hal berupa data dan fakta yang peneliti temukan pada saat pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian tersebut ditemukan ketika pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Balikpapan. Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Balikpapan dilakukan peneliti dalam rangka mendeskripsikan perlindungan sosial oleh Dinas Sosial. Peneliti akan menggunakan teori untuk membahas peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan 3 dimensi Peran menurut Jones (1993) yaitu, Perencana Peran, Pelaksana Peran, dan Pengawas Peran. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1 Perencanaan Peran (*Regulatory Role*)

Rencana pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan bagian dari upaya sistematis dan terstruktur dalam menangani permasalahan sosial terkait anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Pembinaan dipahami sebagai proses yang melibatkan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, metode, serta sistem tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, yakni peningkatan kualitas hidup kelompok marginal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Sekretaris Dinas Sosial, rencana pembinaan adalah perencanaan yang disusun secara sistematis dengan tujuan mengembangkan individu, kelompok, atau organisasi melalui berbagai kegiatan terstruktur. rencana pembinaan dimulai dari proses penjangkauan langsung ke lapangan, dilanjutkan dengan pendataan, serta pemberian penampungan sementara di rumah singgah. Dalam masa penampungan, para peserta mendapatkan layanan bimbingan sosial, konseling psikologis, hingga pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan wirausaha kecil. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pelatihan dan organisasi sosial mitra guna mendukung keberhasilan reintegrasi peserta ke dalam keluarga atau kehidupan yang lebih mandiri secara ekonomi.

Anggaran rencana menunjukkan adanya efisiensi dan efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan jalannya program pembinaan, khususnya dalam penggunaan anggaran, di mana efektivitas mencerminkan tercapainya tujuan program, dan efisiensi menunjukkan sejauh mana anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal penganggaran, Dinas Sosial menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan prioritas program dan kondisi lapangan. Anggaran rencana pembinaan di Dinas Sosial Kota Balikpapan disusun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kesejahteraan kelompok sasaran, seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya .

Anggaran pembinaan dialokasikan dari belanja langsung APBD yang mencakup seluruh aspek pelaksanaan program, termasuk kegiatan lapangan, operasional rumah singgah, konsumsi peserta, perlengkapan pelatihan, honorarium narasumber, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Efektivitas dan efisiensi menjadi tolok ukur penting dalam pemanfaatan anggaran ini. Hal tersebut disusun setiap tahun secara terpadu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan aktual, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Sosial.

Penyusunan anggaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun, berdasarkan prioritas program dan kebutuhan di lapangan. Dana yang dialokasikan dari APBD mencakup operasional lapangan, pelatihan, konsumsi, honor narasumber, serta biaya monitoring dan evaluasi.

Setelah penyusunan rencana anggaran, adapun target dari rencana pembinaan adalah tercapainya perubahan sosial yang nyata di kalangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Tujuan utamanya adalah menekan jumlah mereka di Kota Balikpapan melalui serangkaian kegiatan pembinaan yang diberikan. Setiap tahun, target yang ditetapkan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, namun secara umum kami menargetkan setidaknya 50% dari peserta yang mengikuti pembinaan bisa kembali ke keluarganya atau mampu hidup mandiri, baik secara sosial maupun ekonomi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial serta Pekerja Sosial, target yang ingin dicapai mencakup berkurangnya jumlah mereka di Kota Balikpapan, serta meningkatnya jumlah peserta yang berhasil direintegrasikan ke dalam keluarga atau mampu hidup mandiri setelah mengikuti program. Target disusun secara kuantitatif dan kualitatif, misalnya partisipasi aktif dalam kegiatan, kembali ke sekolah, atau memulai usaha mandiri. Penetapan target didasarkan pada data jumlah PMKS dan hasil evaluasi program pembinaan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, keseluruhan proses perencanaan ini sejalan dengan konsep perencanaan menurut Bintoro Tjokroaminoto dalam Husaini Usman (2008) yang menyatakan bahwa perencanaan adalah proses sistematis dalam menyiapkan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

### **3.2 Pelaksana Peran (*Enabling Role*)**

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan merupakan usaha-usaha tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dinas Sosial memiliki fungsi yang sangat krusial dalam pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat daerah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan masalah sosial, Dinas Sosial berperan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Salah satu fungsi utama Dinas Sosial adalah melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis melalui program rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan mereka ke dalam tatanan sosial yang lebih baik. Dengan berbagai pendekatan, mulai dari pemberian pelatihan keterampilan, konseling, hingga reintegrasi sosial, Dinas Sosial memastikan bahwa mereka yang terdampak oleh masalah sosial ini dapat memperoleh kesempatan untuk hidup layak dan mandiri, serta mengurangi ketergantungan pada kehidupan jalanan. Melalui fungsi ini, Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan efektif.

Pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan proses nyata yang dijalankan secara sistematis untuk mencapai tujuan dari program pembinaan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial, pelaksanaan ini mencakup berbagai tahapan mulai dari penjangkauan lapangan yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja, dilanjutkan dengan identifikasi, registrasi, dan asesmen oleh pekerja sosial. Asesmen ini bertujuan menelaah latar belakang permasalahan individu, potensi yang dimiliki, serta kondisi sosial dan keluarga yang melatarbelakanginya. Peserta kemudian ditempatkan di Rumah Perlindungan Sosial untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang mencakup konseling, terapi psikososial, pelatihan keterampilan, advokasi hukum, serta kegiatan edukatif dan rekreatif. Proses pembinaan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama psikolog, psikiater, pendidik luar sekolah, dan lembaga mitra lainnya.

Pelaksanaan pembinaan yang Dinas Sosial lakukan dimulai dari pelaksanaan penjangkauan dengan dilakukannya razia oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah itu dilakukannya Identifikasi dan registrasi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial. Setelah pelaksanaan identifikasi dan

registrasi, proses asesmen dilakukan untuk menelaah masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, potensi yang dimiliki, kondisi keluarga dan lingkungannya, serta kebutuhan yang harus dipenuhinya. Selama proses asesmen pekerja sosial sangat berperan untuk memerikan motivasi dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya akan dilakukan pendampingan untuk membantu individu maupun kelompok yang didampingi oleh Pekerja Sosial untuk mengembangkan proses interaksi dan komunikasi. Adapun jenis pembinaan yang dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial, adanya Pelayanan Rehabilitasi untuk yang membutuhkan terapi dan penyembuhan traumanya Dinas Sosial bekerja sama dengan psikolog, psikiater, ahli agama dan terapis. Pelayanan Advokasi bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis yang menghadapi masalah hukum, Kegiatan ini dilakukan Bersama-sama dengan mitra kerja Dinas Sosial seperti UPTD PPA dan UPPA, dan Kepolisian. Pelayanan pendampingan dan pengasuhan, petugas dan tim Rumah Perlindungan Sosial melakukan pendampingan dan pengasuhan setiap hari dengan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pelayanan Kesehatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, Pelayanan rekreatif edukatif, yaitu kegiatan pengisian waktu luang sesuai dengan minat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Menyediakan layanan Pendidikan, dengan ini Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk penyelenggaraan Pendidikan bagi anak jalanan yang berada di Rumah Perlindungan Sosial termasuk penyediaan guru Pendidikan luar sekolah atau tutor untuk mengisi kegiatan anak jalanan. Berikut adalah data anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang telah mendapat pembinaan di Dinas Sosial Kota Balikpapan:

**Tabel 3.1**  
**Data Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Yang Mendapat Pembinaan di Dinas Sosial Kota Balikpapan**

NO	JENIS PMKS	JUMLAH YANG DILAYANI	KETERANGAN
1	Anak Jalanan	179	Anak di rehabilitasi dasar di Rumah Perlindungan Sosial Anak selama 3 hari hingga 7 hari, dilakukan pembinaan di 4 komunitas anak jalanan milik Masyarakat dan 5 anak di rujuk ke Panti Sosial Anak Asuh Harapan Samarinda untuk disekolahkan
2	Gelandangan dan Pengemis	143	Bimbingan fisik, mental, spiritual di Rumah Penampungan Dinas Sosial dan setelah di assesmen ada yang tinggal menetap, dipulangkan atau direunifikasi ke daerah asal serta di rujuk ke panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
	JUMLAH	322	

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Sosial, 2025

Berdasarkan Tabel 3.1 jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang telah mendapatkan pembinaan ini menjadi indikator bahwa Dinas Sosial secara aktif melakukan upaya penanganan terhadap permasalahan sosial tersebut. Dengan ini diharapkan keberlanjutan pembinaan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan dan membantu mereka untuk hidup lebih layak serta mandiri.

Pendampingan menjadi hal penting dalam proses pembinaan. Pendampingan itu sendiri merupakan salah satu proses dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendamping hanya memberikan bimbingan, saran, dan bantuan konsultif tidak mempunyai kekuasaan lebih, sedangkan masyarakat yang didampingi dengan pendamping harus memiliki tujuan yang sama. Pelaksanaan Pendampingan merupakan proses memberikan dukungan, arahan, motivasi, serta asistensi langsung kepada individu atau kelompok yang mengalami permasalahan sosial agar dapat menjalani proses perubahan atau pemberdayaan secara optimal.

Proses selanjutnya yaitu Pemantauan, pemantauan adalah sebuah siklus kegiatan yang meliputi proses pengumpulan, peninjauan ulang pelaporan dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Pemantauan terhadap pembinaan merupakan proses pengawasan dan pengumpulan data secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan, untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, mencapai target, dan memberikan dampak yang diharapkan bagi sasaran penerima manfaat. Pemantauan yang dilakukan Dinas Sosial dapat menemukan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang mengalami kesulitan atau kembali ke jalanan, peneliti pun menanyakan apa yang dilakukan Dinas Sosial ketika menemui hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Pak Rudi Nugraha, beliau menjelaskan jika adanya indikasi mereka kembali ke jalanan atau kesulitan beradaptasi, Dinas Sosial akan segera mendekati mereka. Kami melakukan pendekatan ulang dan memberikan pendampingan lebih intensif. Terkadang mereka merasa kesulitan dalam penyesuaian sosial, jadi perlu dilakukan bantuan dengan memberikan pelatihan tambahan atau bantuan psikososial.

Pemantauan Menjadi bagian penting dalam pelaksanaan, dilakukan secara persuasif dan humanis untuk memulihkan fungsi sosial peserta. Anak-anak diarahkan untuk kembali mengenyam pendidikan, sementara peserta dewasa diikutsertakan dalam pelatihan kerja agar dapat kembali mandiri. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti LSM, tokoh masyarakat, instansi pendidikan, dan lembaga pelatihan. Namun, dalam praktiknya, tantangan tetap muncul seperti rendahnya kepercayaan peserta terhadap lembaga sosial, keinginan untuk tetap hidup bebas di jalan, serta keterbatasan tenaga pendamping dan fasilitas rumah singgah. Dinas Sosial Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya pembinaan oleh pihak terkait, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih dijumpai di beberapa titik kota. Untuk memahami perkembangan situasi ini, berikut disajikan data jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 3.2**  
**Data Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Balikpapan**

NO	JENIS PMKS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Jalanan	19	21	74	37	28
2	Gelandangan dan Pengemis	28	28	40	22	25
	JUMLAH	47	49	114	59	53

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Sosial, 2025

Pada data pada Tabel 3.2 menunjukkan penurunan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan, keberadaan mereka masih sering dijumpai. Hal ini menandakan bahwa permasalahan sosial tersebut belum sepenuhnya teratasi. Penurunan angka ini merupakan hasil dari upaya pembinaan yang berjalan, namun faktor ekonomi, khususnya kemiskinan, tetap menjadi penyebab utama yang memicu munculnya kembali permasalahan serupa.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Dinas Sosial juga melaksanakan pemantauan secara berkala. Pemantauan dilakukan oleh pekerja sosial dengan dukungan dari masyarakat sekitar, LSM, dan tokoh lokal melalui kunjungan langsung ke tempat tinggal atau lokasi aktivitas peserta. Jika ditemukan peserta yang mengalami kesulitan atau kembali ke jalan, maka dilakukan pendekatan ulang

dan pendampingan tambahan. Keterbatasan sumber daya manusia serta kecenderungan peserta menghindari pengawasan menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan ini.

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi program, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mencari informasi berkaitan dengan bekerjanya sesuatu, kemudian informasi tersebut dikumpulkan dan digunakan sebagai alternatif yang tepat dalam menetapkan sebuah Keputusan. Evaluasi pembinaan adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana program pembinaan yang dijalankan oleh Dinas Sosial telah mencapai tujuan, berjalan sesuai rencana, dan memberikan manfaat yang nyata bagi penerima manfaat.

Evaluasi program pembinaan yang dilakukan secara langsung melalui monitoring lapangan maupun evaluasi berkala tiap 1 hingga 3 bulan. Evaluasi ini menilai indikator perubahan perilaku, kemandirian ekonomi, kemampuan berinteraksi sosial, serta kepatuhan terhadap aturan. Jika ditemukan peserta yang belum menunjukkan hasil signifikan, maka dilakukan evaluasi lanjutan, pendampingan intensif, atau modifikasi program seperti pelatihan tambahan atau pendekatan dengan keluarga. Secara keseluruhan, pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan telah mengikuti tahapan yang telah direncanakan dan menekankan kerja sama multisektor meskipun masih menghadapi tantangan internal. Upaya ini selaras dengan pendapat Wiestra (2014) yang menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan usaha dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, mencakup kesiapan alat, pelaksana, lokasi, serta waktu pelaksanaan secara terstruktur.

### **3.3 Pengawas Peran (*Direct Role*)**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Siagian (2007), mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini pengawasan dilakukan untuk memastikan anak jalanan dan gepeng mengikuti pembinaan dengan baik dan sesuai prosedur. Setiap tahapan pembinaan diawasi oleh pekerja sosial secara rutin dan berkala. Kami memiliki sistem pengawasan yang terstruktur, di mana pekerja sosial melakukan pemantauan langsung turun ke lapangan pada setiap sesi kegiatan pembinaan, termasuk saat pelatihan, untuk memastikan kelancaran dan mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi.

Pengawasan kegiatan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan dilaksanakan secara rutin dan terstruktur oleh para pekerja sosial, yang turun langsung ke lapangan untuk memantau setiap tahapan mulai dari penjangkauan, pelatihan, hingga pendampingan agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur. Sistem pengawasan ini bertujuan menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, meski sering menemui kendala seperti keterbatasan jumlah petugas dan rasa tidak nyaman dari peserta yang merasa terlalu diawasi.

Di samping itu, identifikasi dampak dan hasil pembinaan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh yang mengukur perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, keberhasilan reintegrasi sosial, kemandirian ekonomi, serta perbaikan kondisi mental dan fisik peserta. Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan,

membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri

Identifikasi dampak dan hasil pembinaan adalah proses untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada peserta atau sasaran program setelah mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Hal ini meliputi perubahan sikap, kondisi sosial-ekonomi, kemandirian, serta integrasi kembali ke masyarakat.

Analisis dampak membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi, memanfaatkan data kehadiran, laporan wawancara, dan umpan balik lembaga mitra. Bila ditemukan peserta yang belum menunjukkan hasil positif, pekerja sosial melakukan evaluasi lanjutan dan penyesuaian intervensi misalnya pendampingan intensif atau pelatihan tambahan untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh manfaat maksimal dari program. Secara keseluruhan, pengawasan dan identifikasi dampak menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan pembinaan sosial, sejalan dengan prinsip pengendalian kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Siangian (2007).

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Diskusi Temuan Utama Penelitian Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dari berbagai aspek yaitu metode yang digunakan, teori, serta objek penelitian. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya yaitu mengisi kekurangan penelitian dari ketiga aspek di atas.

Dalam menjabarkan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana menekankan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sehingga diperoleh makna yang mendalam atas situasi yang terjadi secara alami atau apa adanya. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada pendekatan fisik dan ekonomi, seperti razia, shelter, pelatihan keterampilan, dan pemberian modal. Bentuk pembinaan Dinas Sosial yang dilakukan pada pendekatan psikososial umumnya belum dominan diterapkan. Penekanan masih pada Tindakan preventif dan rehabilitative fisik. Keterlibatan pihak lain pun masih terbatas misalnya Satpol PP, yayasan mitra, atau shelter dan masih bersifat sektoral. Pada pendekatan kolaboratif Kolaborasi belum maksimal atau masih terhambat oleh fasilitas dan koordinasi antarinstansi. Adapun kendala umum pada penelitian lain terdapat pada keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat/orang tua, dan anak kembali ke jalan.

Maka dari itu, adapun yang menjadi pembeda pada ini ialah tentang bagaimana pendekatan pembinaan Menggunakan pendekatan holistik dan humanis: tidak hanya fisik dan ekonomi, tapi juga menyentuh psikososial, edukatif, dan spiritual. Pendekatan Psikososial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Balikpapan menggunakan konseling dan terapi sebagai bagian dari proses pembinaan, untuk menyentuh aspek emosional dan psikologis anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Keterlibatan pihak lain pada penelitian ini ditemui bahwa terdapat sinergi multi pihak seperti LSM, tokoh masyarakat, lembaga pelatihan, bahkan unsur keagamaan terlibat secara aktif. Pada pendekatan kolaboratif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Balikpapan yang melakukan kolaborasi lintas sektor berjalan cukup efektif dan strategis sebagai bentuk pendekatan integratif dan adaptif.

Temuan penelitian di Dinas Sosial Kota Balikpapan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung menekankan

aspek teknis, administratif, atau sektoral, pendekatan di Balikpapan menonjol karena menyeluruh, humanis, dan kolaboratif.

Fokusnya bukan hanya pada penertiban atau pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pemulihan mental, spiritual, dan sosial anak jalanan, gepeng, serta pelibatan komunitas sebagai kekuatan sosial. Kemudian, dengan dasar teori peran milik Jones dalam Mahsun (2008) dapat dipahami bahwa peran dapat dinilai terlaksana melalui keterwujudan tiga aspek, yaitu rencana peran, pelaksana peran, dan pengawas peran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah berjalan dengan baik melalui beberapa tahapan, seperti penjangkauan di jalanan, identifikasi dan registrasi, asesmen mendalam terhadap kondisi sosial, potensi, serta lingkungan keluarga, hingga proses pendampingan oleh pekerja sosial dan pemberian layanan rehabilitasi, advokasi, pengasuhan, kesehatan, serta pendidikan di Rumah Perlindungan Sosial.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini memperkuat dan melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya, sekaligus menunjukkan bahwa pola pembinaan di Kota Balikpapan memiliki karakteristik yang cukup komprehensif dan terintegrasi, yang dapat menjadi model rujukan bagi daerah lain dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis secara berkelanjutan.

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Balikpapan melaksanakan peran strategis dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis melalui pendekatan yang menyeluruh, meliputi fungsi sebagai perencana (*regulatory role*), pelaksana (*enabling role*), dan pengawas (*direct role*). Dalam peran perencana, Dinas Sosial menyusun program secara sistematis mulai dari penjangkauan hingga pelatihan keterampilan, dengan dukungan anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan aktual dan prioritas program. Sebagai pelaksana, Dinas Sosial menjalankan program dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga mitra untuk memberikan layanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial secara terpadu. Namun, pelaksanaan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta resistensi dari peserta. Dalam hal pengawasan, pekerja sosial aktif melakukan pemantauan dan evaluasi dampak program guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap peserta mengalami peningkatan dari segi sosial, psikologis, dan ekonomi. Ketiga peran ini saling terintegrasi dan berjalan selaras dengan teori-teori kebijakan sosial, menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan sosial menuntut perencanaan yang matang, pelaksanaan yang kolaboratif, dan pengawasan yang ketat serta berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian,** Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada di Kota Balikpapan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*),** Peneliti menyadari bahwa keterbatasan partisipasi responden menjadi kendala dalam memperoleh gambaran yang menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat melibatkan peserta program binaan secara langsung agar efektivitas dan tantangan pembinaan dapat dikaji dari perspektif penerima manfaat. Selain itu, kajian lanjutan dapat memperdalam aspek kolaborasi lintas sektor, seperti keterlibatan dunia usaha, sekolah, dan tokoh masyarakat, serta menganalisis dampak jangka panjang program secara lebih mendalam. Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi, serta pengembangan model pembinaan berbasis komunitas juga dapat menjadi fokus penting dalam penelitian selanjutnya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Mahsun M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, edisi pertama*. BPFE Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Usman, H. (2008). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.

### B. Jurnal

- Abdullah, Y. A. (2021). Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 9(1), 78–91. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal Januari \(02-14-21-10-34-11\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal%20Januari%20(02-14-21-10-34-11).pdf)
- Almaida, A., Eka Putri O. A., A., Zulkifli, Z., Ridwan Said Ahmad, M., & Arifin, I. (2023). Fenomena Anak Jalanan di Kota Makassar dan Problematika yang Dihadapi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(12), 3131–3138. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.721>
- Caesar, M. R., & LISTANIA, T. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Neo Politea*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v1i2.104>
- Destiani, D. A., Nastia, & Basir, M. A. (2023). Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(3), 555–564. <https://stp-mataram.ejournal.id/JIP/article/view/2708%0Ahttps://stp-mataram.ejournal.id/JIP/article/download/2708/2176>
- Djaafar, L., Wantu, S., Lukum, R., & Hamid, S. Al. (2022). Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Pengemis di Kota Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(4), 1553. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1101>
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 84–97. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1103>
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*, 5(September), 145–161. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>
- N, V. S. A., Y, E. Y., & Apriliansah, F. (2023). Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 41–48. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3991>
- Nagaring, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado).

- Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 105–119.
- Nurrahman, A. (2020). Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 1–15.  
<https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2314>
- Okta, N., Dewi, P., Arza, R. A., Setiawan, I., & Fauza, Z. (2024). Pengabdian Masyarakat Melalui Pendataan Kemiskinan dengan Aplikasi BANGKIT. 153–166.  
<https://doi.org/10.33701/cc.v4i2.4965>
- Pratama Afjan, W. Y., & Hayat, H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Journal Publicuho*, 6(2), 549–559. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156>
- Puri, A., & Hertati, D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–11. <http://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/3020%0Ahttp://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/download/3020/1795>
- Purwoko, T. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak eJournal Sosiologi. *EJurnal Sosiologi*, 1(4), 13–25.
- Rachma, D. T. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional*, 662–672.
- Rahmadanita, A. (2019). PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1, 95–104.  
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Sakir, A. R., Amaliah, Y., Lukman, J. P., & Rajab, M. (2023). Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 19–26.  
<https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.247>
- Salsabila, Q., Gabriela Purba, & Selvia Evayanti Saragih. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 132–141. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>
- Sekarini, A. Y. D. (2018). Analisis Kinerja Aparatur Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal MSDM*, 5(2, Desember), 175–194.  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSD/article/view/442/267>
- Syamsurya. (2022). *Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis di Kota Samarinda*. 1–23.
- Tambawang, L., Sofyan, A., Susilawaty, S., Juli, L., & Fatimah, S. (2023). Pembinaan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 322–327. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.996>
- Wahyudi, A., Usman, J., & Mone, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Journal.Unismuh*, 2(4), 1287–1299.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>